

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Ades Hidayah¹, Sopiyan AR², Riana Mayasari³

¹²³Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri
Sriwijaya
adeshidayah12@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that influence fiscal incentive funds in provincial local governments in Indonesia during the 2020-2022 period. The variables studied include fiscal incentive funds, regional financial independence ratio, regional spending efficiency ratio, and regional financial efficiency ratio. This study uses a quantitative method with a sample of 25 provinces selected using purposive sampling technique. The data collected is in the form of local government financial reports. The results showed that both partially and simultaneously, independent variables such as regional financial independence ratio, regional expenditure efficiency ratio, and regional financial efficiency ratio have an influence on fiscal incentive funds. These results are reinforced by literature studies which show that the independent variables in previous studies also have an effect on fiscal incentive funds.

Keywords: *Fiscal Incentive Funds, Regional Financial Independence Ratio, Regional Spending Efficiency Ratio, and Financial Efficiency*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dana insentif fiskal pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode 2020-2022. Variabel yang diteliti meliputi dana insentif fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 25 provinsi yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel-variabel independen seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap dana insentif fiskal. Hasil ini diperkuat oleh studi literatur yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian sebelumnya juga berpengaruh terhadap dana insentif fiskal.

Kata kunci: *Dana Insentif Fiskal, Rasio, Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah suatu sistem atau kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengembangkan wilayah beserta seluruh isinya. Di Indonesia, sistem otonomi daerah ini sudah diimplementasikan dimana salah satunya

pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Otonomi daerah memungkinkan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat di beberapa bidang, termasuk kebijakan pengelolaan keuangan yang menjadi kebijakan daerah. Menurut (Masnila et al., 2021), pemerintah daerah harus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena akuntabilitas diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas bagi publik. (Mayasari, 2022), menambahkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah tanggungjawab pemerintah atas program dan kegiatan yang terselesaikan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, ada sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan keuangan pemerintah menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah. Laporan ini juga berfungsi sebagai wujud tanggung jawab atas pengelolaan keuangan oleh sebuah pihak, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Semua pemerintah daerah menginginkan laporan keuangan yang memadai sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, pemerintah pusat menerapkan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Aturan ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan Dana Insentif Daerah, yang pada tahun 2023 berganti nama menjadi Dana Insentif Fiskal, sebagai bagian dari transfer dana untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Dana insentif fiskal merupakan penghargaan atas peningkatan kinerja dalam berbagai aspek seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat, yang dibiayai melalui APBN. Hal ini penting untuk mendorong pemerintah daerah agar melakukan perubahan yang bertujuan meningkatkan kinerja mereka.

Menurut Parleментарia dpr.go.id, Anwar Hafid menyatakan bahwa penilaian Dana Insentif Daerah (DID) masih cenderung subjektif, terutama dalam hal inovasi daerah, menanggapi penurunan drastis DID yang diterima Kota Sukabumi pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat masalah ini, diperlukan penelitian terkait penerimaan dana insentif fiskal, di mana beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia terlalu fokus pada aspek inovasi daerah untuk menerima dana insentif fiskal. Namun, sesuai dengan pengelolaan dana insentif daerah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.167 tahun 2020, terdapat dua aspek penilaian selain inovasi daerah. Aspek penilaian lainnya adalah kategori kinerja, yang meliputi pengelolaan keuangan yang baik (50%), perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur melalui inovasi

daerah (25%), serta kesejahteraan masyarakat (25%). Penurunan dana insentif fiskal ini dapat disebabkan oleh fokus yang berlebihan pada inovasi daerah, sementara aspek lain seperti kinerja keuangan juga penting. Akibatnya, banyak pemerintah daerah mengalami penurunan insentif fiskal yang disalurkan oleh pemerintah pusat, yang terjadi hampir di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam konteks ini, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penilaian untuk mendapatkan dana insentif fiskal. Kinerja keuangan ini mencakup kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk menentukan apakah laporan keuangan mencerminkan kinerja yang baik sebagai indikator penerimaan dana insentif fiskal, digunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dana insentif fiskal yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (Septiani & Gamayuni, 2023) mengatakan dengan peningkatan kemandirian keuangan, pemerintah provinsi tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan dapat menghasilkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai berbagai program kegiatannya. Pencapaian ini layak mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat melalui pemberian Dana Insentif Fiskal. Faktor selanjutnya yaitu Rasio Efisiensi Belanja Daerah, (Septiani & Gamayuni, 2023), mengatakan efisiensi yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola keuangan dengan baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan tidak terbuang sia-sia. Sebagai hasilnya, pemerintah pusat akan memberikan apresiasi dalam bentuk Dana Insentif Fiskal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Septiani & Gamayuni, 2023), menggunakan pengaruh pendapatan, yang diukur dengan rasio kemandirian dan belanja diukur dengan rasio efisiensi belanja, terhadap dana insentif daerah secara terpisah. Namun, jika pendapatan dan belanja dihitung secara bersamaan, akan terlihat seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut, yang pada akhirnya menunjukkan kualitas kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebagai kebaruan dalam penelitian ini, dengan membandingkan langsung realisasi belanja dan realisasi pendapatan, tanpa memisahkannya. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah efisiensi keuangan yang baik berpengaruh terhadap penerimaan dana insentif fiskal. Argumen ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Distress* (Septyaningtyas & Poerwati, 2022). Artinya, jika suatu daerah tidak efisien dalam pengelolaannya, daerah tersebut mungkin tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai atau mencukupi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, ketidakefisienan keuangan daerah dapat mempengaruhi penerimaan dana insentif fiskal.

Tingginya angka rasio kemandirian menunjukkan suatu daerah memiliki pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat menginisiasi penerimaan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh (Talumewo et al., 2020) menunjukkan bahwa tingginya rasio kemandirian dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti kesejahteraan, lingkungan, dan keuangan yang memengaruhi tingkat kemandirian daerah. Penelitian terbaru oleh (Septiani & Gamayuni, 2023), mendukung hipotesis ini dengan temuan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mempengaruhi dana insentif fiskal. Kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta meningkatkan kinerja keuangan, yang semuanya dapat memicu pemberian insentif dari pusat berupa Insentif Fiskal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal.

Rasio efisiensi belanja daerah yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memanfaatkan alokasi anggaran dengan efisien, sehingga mereka berpotensi memenuhi syarat untuk menerima insentif tambahan berupa dana insentif fiskal. Hal ini didukung oleh penelitian yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap dana insentif daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia, di mana variabel independen rasio efisiensi belanja daerah terbukti berpengaruh terhadap penerimaan dana insentif daerah (Septiani & Gamayuni, 2023). Sebaliknya, rasio efisiensi belanja daerah yang kecil dapat menyebabkan pemerintah daerah memperoleh insentif fiskal yang rendah atau bahkan tidak menerima insentif sama sekali dari pemerintah pusat. Adanya keberhasilan kinerja keuangan, daerah tersebut terdapat peluang untuk mendapatkan Insentif Fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal.

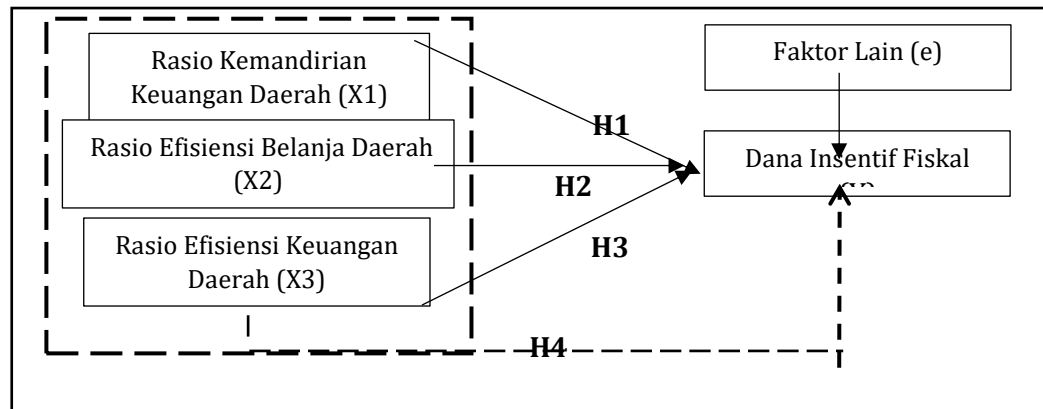
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018), juga menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian oleh (Sartika, 2019), mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah mempengaruhi kinerja keuangan. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, dipengaruhi oleh rasio efisiensi keuangan daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap dana insentif fiskal, jika dilihat dari kategori kinerja. Berikut hipotesis yang ditarik:

H₃: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal.

Pemerintah daerah berharap untuk mendapatkan laporan keuangan yang memadai agar dapat mencerminkan kinerja yang positif dalam pengelolaan keuangan sehingga memungkinkan pemerintah pusat memberikan dana insentif fiskal. Tentunya pengelolaan keuangan yang baik dapat diukur dengan banyak hal yaitu rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai sendiri kegiatan dan pembangunan di wilayahnya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat, rasio efisiensi belanja daerah mengukur seberapa baik pemerintah daerah mengalokasikan dan menggunakan anggaran belanja yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan rasio efisiensi keuangan daerah mencakup kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara seimbang, serta dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Secara keseluruhan, hipotesis ini berargumen bahwa daerah-daerah yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik melalui baiknya angka rasio kemandirian, efisiensi belanja, dan efisiensi keuangan secara keseluruhan, cenderung akan lebih berpeluang mendapatkan alokasi dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Maka hipotesis H1 sebagai berikut:

H4: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Dearah mempunyai pengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif dengan mengaplikasikan data yang tersedia dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersumber dari website BPK dan laporan keuangan TKDD DJPK Kemenkeu RI pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2020-2022. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan analisis data dilakukan dengan SPSS 29 dan diperkuat dengan studi literatur

jurnal penelitian terdahulu. Menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020 s/d 2022	34
2.	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang tidak menerima Dana Insentif Fiskal pada tahun tertentu.	(9)
3.	Jumlah Sampel Penelitian	25

Sumber: Data diolah, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimuma	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	75	0.22	1.52	0.5957	0.27146
X2	75	0.61	0.98	0.8671	0.06602
X3	75	0.43	1.46	0.8196	0.18090
Y	75	1441174000	95683168000	42121700227	21129273034
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

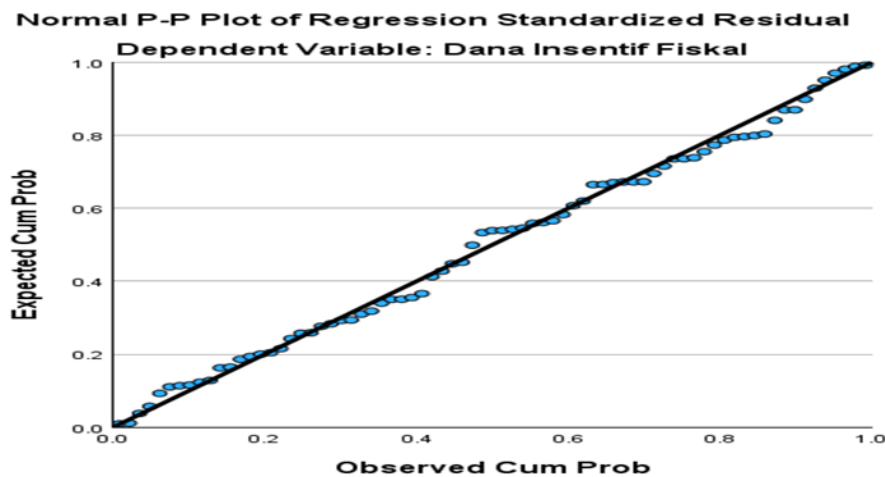
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogrov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Param ^{a,b}	Mean	0.0000123
	Std. Dvt	11200655024
Most Extr Diff	Abs	0.059
	Positive	0.059
	Negative	-0.054

Test Statistic		0.059
Asy. Sig. (2-tailed) ^c		0.200 ^d
Monte C. Sig. (2-tailed) ^e		0.757
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	0.745
	Upper Bound	0.768

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Normal P-P Plot

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Berdasarkan tabel 3 dari hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi adalah $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Pada grafik p-p plot, terlihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal, sehingga grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

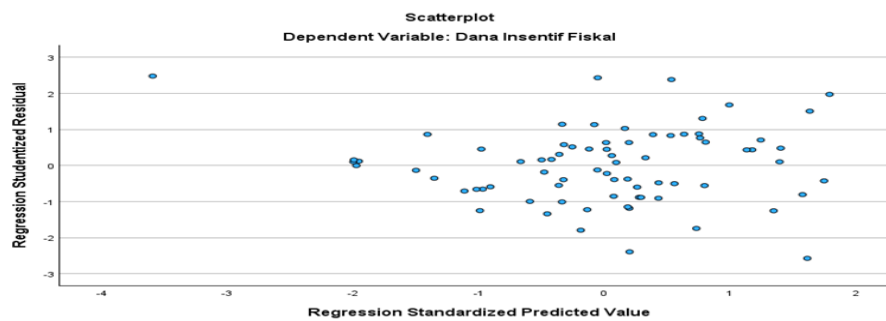
Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Stand. Coef.	t	Sig.	Toler	VIF		
	B	Std. Error						

1	Constant	61209220717.4	2421508		0.253	0.001		
	X1	22205393411	6103631	0.285	3.638	<0.001	0.644	1.554
	X2	79955736310	2407719	0.250	3.321	0.001	0.699	1.430
	X3	-56801692641	9243691	0.486	-6.145	<0.001	0.632	1.583

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Oleh karena itu, disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas diantara seluruh variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji White

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted RaSquare	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	0.462 ^a	0.214	0.131	166611150017601770000.000	2.370

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Dilihat dari Gambar 4, tampak bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 5 hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji white berpacu pada nilai *chi square* tabel sebesar 95,081467 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan nilai *chiasquare* hitung yaitu R Square x jumlah sampel (n) $a = 0,214 \times 95,081467 = 16,05$. Dasar pengambilan keputusan pada Uji White apabila nilai *chi square* hitung < nilai *chi square* tabel, maka dikatakan tidak terjadi

heterokedastisitas, dimana nilai *chi square* hitung 16,05 lebih kecil dari nilai *chi square* tabel 95,081467.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin – Watson
1	0.848 ^a	0.719	0.707	11434840385	1.918

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Berdasarkan tabel 6 karena nilai DW sebesar 1,918 berada di antara nilai *du* dan *(4-du)* yaitu 1,7092 dan 2,2908 ($du < DW < 4-du$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 8, diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6120920717,377 + 22205393410,937X_1 + 79955736309,803X_2 - 56801692640,81X_3 + e$$

Berdasarkan model regresi diketahui nilai Constanta (a) sebesar 6120920717,377. Hal tersebut mengindikasikan apabila variabel independen yang bernilai 0 maka Dana Insentif Fiskal bernilai positif yaitu sebesar 6120920717,377. Nilai koefisien Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah sama-sama bernilai positif sebesar 22205393410,937 dan 79955736309,803 artinya, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan mengalami kenaikan penerimaan Dana Insentif Fiskal dengan diasumsikan bahwa nilai variabel independen lainnya tetap sama. Sedangkan nilai koefisien Rasio Efisiensi Keuangan Daerah bernilai negatif sebesar -56801692640,81 artinya Rasio Efisiensi Keuangan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan mengalami kenaikan penerimaan Dana Insentif Fiskal dengan diasumsikan bahwa nilai variabel independen lainnya tetap sama.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan pengujian pada tabel 6, ditemukan bahwa nilai R memiliki nilai 0,848 yang menunjukkan hubungan linier yang tinggi antara variabel independen dan

dependen sedangkan Adjusted R-squared memiliki nilai 0,707. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Insentif Fiskal dipengaruhi oleh ketiga variabel independen sebesar 70,7% sementara 29,3% variabel lainnya yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini berkontribusi terhadap sisa varians tersebut.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	ANOVA ^a					
	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regressi	237533714443161340	3	79177904814387110	60.554	< 0.001
	Residual	928364579887073200	71	130755574631982140		
	Total	330370172431868660	74			

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Tabel 7 menunjukkan nilai F-hitung adalah sebesar 60,554 sedangkan F-tabel untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta pembilang ($k = 3$), dan $df = n - k - 1 = (75 - 3 - 1) = 71$ adalah sebesar 2,73, sehingga dapat dijelaskan F hitung sebesar $60,554 > F\text{-tabel } 2,73$ dengan tingkat signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Maka H_0 ditolak atau H_a diterima, Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Std. Error	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	61209220717.4	24215084610		0.253	0.001
	X1	22205393411	6103631359.1	0.285	3.638	< 0.001
	X2	79955736310	24077199350	0.250	3.321	0.001
	X3	-56801692641	9243691603.9	0.486	-6.145	< 0.001

Sumber: Output data diolah (SPSS 29), 2024

Berdasarkan Tabel 8, Nilai t hitung untuk variabel rasio kemandirian keuangan daerah adalah 3,638 dengan signifikansi $< 0,001$. Sementara itu, nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k$ atau $df = 75 - 4 = 71$ adalah 1,993/-1,993. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,638 > 1,993$) dan nilai signifikansi kurang dari $< 0,001 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana insentif fiskal secara parsial.

Berlandaskan Tabel 8, nilai t hitung variabel rasio efisiensi belanja daerah adalah 3,321 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k$ atau $df = 75 - 4 = 71$ adalah 1,993/-1,993. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,321 > 1,993$) dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana insentif fiskal secara parsial.

Menurut Tabel 8, nilai t hitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah -6,145 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai t tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k$ atau $df = 75 - 4 = 71$ adalah 1,993/-1,993. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-6,145 < -1,993$) dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka disimpulkan rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap dana insentif fiskal secara parsial.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Fiskal

Berlandaskan pengujian yang sudah dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2022 didapatkan nilai t hitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan nilai positif 3,638. Nilai signifikan dalam penelitian ini yang diterapkan yaitu 0,05, pada Uji t dapat dilihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai signifikan sebesar $< 0,001$ maka ($< 0,001 < 0,05$), artinya H_1 diterima sehingga Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Dana Insentif Fiskal.

Peneliti melakukan studi literatur secara mendalam untuk memperkuat argumen dan hasil yang diperoleh, memastikan bahwa temuan penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat serta relevan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam penggunaan variabel rasio kemandirian keuangan daerah. Studi yang dilakukan oleh (Septiani & Gamayuni, 2023), (Firdaus, 2023), dan (Synta & Nurhazana, 2021), menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mempengaruhi dana insentif fiskal, demikian pula penelitian ini mendapatkan hasil yang sama. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil dari (Abidin, 2019) dan (Pambudi, 2023) yang menemukan bahwa rasio kemandirian belum optimal terkait dengan adanya dana insentif fiskal. Sementara itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memang berpengaruh terhadap dana insentif

fiskal, didukung oleh penelitian (Septiani & Gamayuni, 2023). Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkatkan dana insentif fiskal yang diterima. Temuan ini didukung oleh PMK No.167 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengelolaan terhadap keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penilaian dalam memperoleh dana insentif fiskal.

Keunggulan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian (Firdaus, 2023), memperoleh hasil bahwa perlu adanya perbaikan kemandirian keuangan daerah dalam memperoleh dana insentif fiskal. Sedangkan pada penelitian ini telah menjawab bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap dana insentif fiskal dimana ketika suatu daerah mengalami penurunan angka rasio kemandirian maka akan berpengaruh terhadap perolehan dana insentif fiskal yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap dana insentif fiskal, di mana semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pula dana insentif fiskal yang diperoleh oleh pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang baik dalam kategori kinerja keuangan. Jika rasio kemandirian terganggu, kondisi ini mempengaruhi perolehan dana insentif fiskal yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, ditemukan bahwa variabel rasio efisiensi belanja daerah memiliki nilai t sebesar 3,321. Nilai signifikan dalam penelitian ini yang diterapkan yaitu 0,05, dapat diketahui pada uji t Rasio Efisiensi Belanja Daerah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$), maka H_2 diterima artinya Rasio Efisiensi Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang mendalam untuk memperkuat dan memvalidasi temuan yang diperoleh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya oleh (Pasinringi, 2022), (Octariyani, 2022) dan (Septiani & Gamayuni, 2023), yang juga meneliti pengaruh variabel belanja daerah terhadap dana insentif fiskal. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan belanja daerah, semakin besar potensi daerah tersebut untuk memperoleh dana insentif fiskal. Perbedaannya terletak pada penelitian (Synta & Nurhazana, 2021) dan (Maulana, 2023), di mana mereka menggunakan variabel belanja daerah secara umum. Penelitian ini sebaliknya, fokus pada rasio efisiensi belanja daerah, dengan menekankan bahwa semakin efisien pengelolaan belanja daerah, semakin besar pengaruhnya terhadap penerimaan dana insentif fiskal. Studi literatur digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian (Octariyani, 2022) dan (Pasinringi, 2022), dimana pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap dana insentif fiskal, mereka tidak secara spesifik menjelaskan aspek efisiensi dan efektivitas belanja tersebut. Penelitian ini mengukur

rasio efisiensi belanja daerah, memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan dana insentif fiskal. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah memiliki dampak terhadap pemberian dana insentif fiskal dengan bukti bahwa peningkatan efisiensi belanja daerah terkait dengan peningkatan penerimaan dana insentif fiskal. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja merupakan faktor penting dalam memperoleh dana insentif fiskal. Daerah yang mampu mengatur belanja dan pendapatan dengan baik menunjukkan kesehatan fiskal yang kuat dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi efisiensi belanja, semakin baik pengelolaan keuangan daerah dalam memperoleh dana insentif fiskal.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Fiskal

Menurut hasil pengujian dari Uji t dimana menghasilkan nilai t hitung yang negatif sebesar -6,145 dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dengan nilai signifikan sebagai acuan 0,05 dan dengan Uji t mempunyai nilai signifikan sebesar $< 0,001$ maka $< 0,001 < 0,05$ yang berarti H_3 diterima dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Penelitian ini melakukan studi literatur yang mendalam dengan mengacu pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil dari (Arrahman & Cholif, 2022) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan berpengaruh terhadap dana insentif fiskal, di mana semakin rendah rasio efisiensi keuangan, semakin besar dana insentif fiskal yang diterima. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, seperti (Octariyani, 2022), (Siregar & Adha, 2022), dan (Abidin, 2019), pada penelitian tersebut menggunakan variabel pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal yang mempengaruhi dana insentif fiskal. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek pengelolaan keuangan dari sudut pandang efisiensi, khususnya rasio efisiensi keuangan daerah. Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya oleh (Abidin, 2019) dan (Octariyani, 2022), dimana pada penelitian ini lebih rinci dalam mengkaji aspek pengelolaan keuangan. Jika penelitian sebelumnya hanya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap dana insentif fiskal, penelitian ini menyelidiki dari sisi mana pengelolaan keuangan tersebut berpengaruh, khususnya melalui rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana insentif fiskal, yang berarti semakin tinggi angka rasio efisiensi keuangan, maka akan rendah insentif fiskal yang diperoleh. Hal ini didukung oleh studi literatur dari penelitian (Arrahman & Cholif, 2022), yang juga menemukan hubungan negatif antara rasio efisiensi keuangan dan dana insentif fiskal.

Kesimpulannya, ketika rasio efisiensi keuangan daerah berada di bawah 100%, ini menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil mengelola keuangannya dengan

efisien. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan. Dengan demikian, rasio efisiensi keuangan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap alokasi dana insentif fiskal karena mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya dengan baik, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dana insentif fiskal diberikan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui Uji F, nilai F hitung tersebut menunjukkan angka yang lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,73 ($60,554 > 2,73$). Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh untuk seluruh variabel independen adalah sebesar $< 0,001$, menunjukkan $< 0,001 < 0,05$., hasil penelitian ini menunjukkan H_4 diterima dan H_0 ditolak, artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X_2) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap Dana Insentif Fiskal (Y). Hal ini menunjukkan jika semakin baik nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah maka akan semakin meningkat penerimaan Dana Insentif Fiskal yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Peneliti menggunakan studi literatur untuk memahami pengaruh variabel secara simultan. Studi literatur memberikan dasar teoretis yang kuat dan wawasan mendalam mengenai interaksi dan pengaruh berbagai faktor dalam konteks penelitian. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, (Firdaus, 2023) dan (Septiani & Gamayuni, 2023), adalah penggunaan variabel independen yang sama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi belanja daerah, yang terbukti secara simultan mempengaruhi dana insentif fiskal. Perbedaannya, pada penelitian (Synta & Nurhazana, 2021) dan (Pasinringi, 2022), ditemukan bahwa setiap pemerintah daerah belum mampu mencapai kategori kinerja keuangan yang baik untuk memperoleh dana insentif fiskal. Sedangkan penelitian ini memberikan jawaban yang lebih spesifik tentang aspek kinerja keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah, yang ketiganya terbukti secara simultan berpengaruh terhadap dana insentif fiskal.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Abidin, 2019), yang menemukan bahwa perbaikan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap penilaian dana insentif fiskal, adalah bahwa penelitian ini menjelaskan lebih mendalam aspek-aspek yang mempengaruhi perolehan dana tersebut. Penelitian (Firdaus, 2023) menyebutkan kriteria utama penilaian dana insentif fiskal berpengaruh terhadap perolehannya, namun belum menjelaskan secara detail. Sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa selain kriteria utama, kategori kinerja keuangan juga penting

dalam penilaian dana insentif fiskal, seperti yang dibuktikan dalam studi literatur oleh (Septiani & Gamayuni, 2023). Kesimpulannya, kinerja keuangan yang baik sangat penting bagi daerah agar menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur di PMK No.167 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut memperoleh dana insentif fiskal, karena daerah tersebut mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri. Di sisi lain, semakin efisien pengelolaan belanja daerah, semakin besar potensi daerah untuk mendapatkan dana insentif fiskal, karena efisiensi belanja mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik. Selain itu, semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah, semakin besar dana insentif fiskal yang diterima, karena rasio rendah menunjukkan kebutuhan dukungan fiskal tambahan. Secara keseluruhan, daerah dengan efisiensi dan kemandirian yang baik dalam pengelolaan keuangan cenderung lebih berhasil dalam memperoleh dana insentif fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Keterbatasan penelitian ini dimana hanya berfokus pada kinerja keuangan sedangkan penilaian untuk mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat selain kategori kinerja ada juga kriteria utama meliputi Opini BPK atas LKPD (WTP), Penetapan Perda APBD tepat waktu dan Penggunaan *e-Government*. Sehingga masih banyak variabel yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel rasio kinerja keuangan lainnya agar dapat memberikan cakupan penelitian yang lebih luas lagi dan menambah variabel diluar kinerja keuangan, dikarenakan ada banyak faktor penilaian lainnya dalam memperoleh dana insentif fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2019). Tinjauan Atas Kebijakan Dana Insentif Daerah Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Provinsi Dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Arrahman, & Cholif, A. F. (2022). Tinjauan Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020 di Kabupaten Kudus. *Thesis KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Firdaus, E. J. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendapatkan Dana Insentif Daerah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.
- Hidayat, D. R. (2018). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Terhadap Rasio Pertumbuhan Apbd Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009-2014. *Buana Ilmu*, 2.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 843 – 859 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v4i2.530

- Masnila, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The Effect of Good Government Governance on the Financial Reports Quality: The Case of Provincial Capital Governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287.
- Maulana, S. A. (2023). Efektivitas Dana Insentif Daerah Dalam Meningkatkan Belanja Daerah di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.
- Mayasari, R. (2022). Buku Monograf: Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya (J. Febriantoko, Ed.). *Deepublish*.
- Octariyani, E. (2022). Pengaruh Penerapan Discretionary Accrual, Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Insentif Pemerintah Daerah Se-Indonesia.
- Pambudi, A. S. (2023). Synthesis of Problems in Utilizing Regional Incentive Funds (RIF) during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 19–41.
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–9.
- Pasinringi, A. M. F. (2022). Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Dana Insentif Daerah Di Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi.
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Accounting Analysis Journal Financing to Deposit Ratio (Fdr) Dan Non-Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *AAJ*, 466(4).
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *In Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7).
- Septiani, P. R., & Gamayuni, R. R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(5).
- Septyaningtyas, D. P., & Poerwati, Rr. T. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 13 No: 03.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 843 – 859 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i2.530

- Siregar, & Adha, A. L. (2022). Penggunaan Dana Insentif Daerah untuk Bidang Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Thesis KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Synta, & Nurhazana. (2021). Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Tertentu di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP*, 2(2).
- Talumewo, K. D. K. S., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Manado.